

BAB I

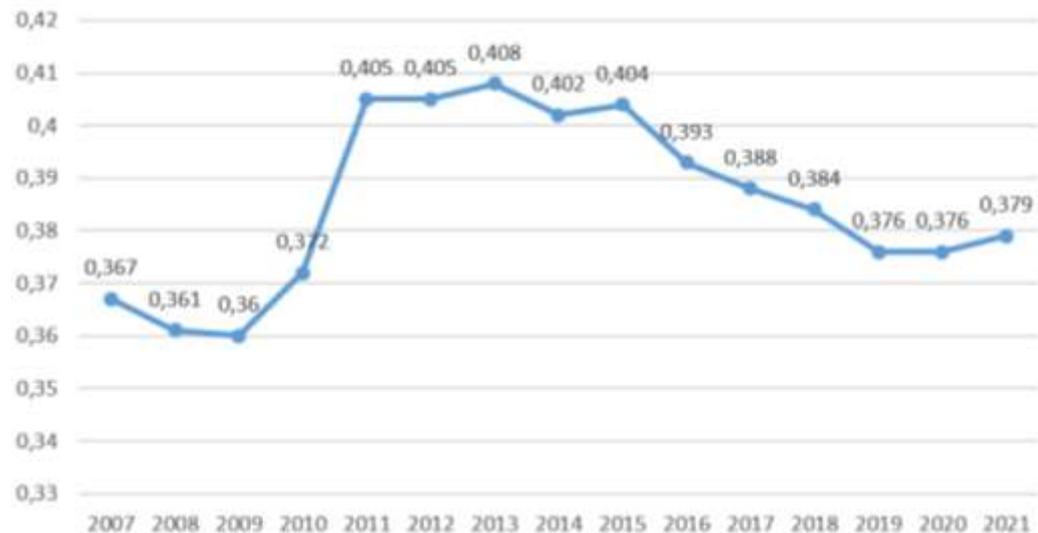
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Distribusi pendapatan mengacu pada bagaimana uang dibagi di antara anggota masyarakat. Pemilik faktor produksi dalam proses manufaktur memiliki imbalan nilai faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi. Tingkat pendapatan masing-masing penyedia faktor produksi dipengaruhi oleh jumlah jasa yang terlibat dalam proses produksi tersebut. Di beberapa negara berkembang, seperti Indonesia, persoalan distribusi pendapatan menjadi pelik dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terutama dalam aspek mengatasi disparitas pendapatan karena perbedaan daya produktif setiap orang, ketika satu orang ataupun kelompok memiliki daya produktif yang lebih tinggi daripada orang ataupun kelompok lainnya (Kalalo et al., 2016).

Dalam prinsip teori keadilan Rawls, perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Kondisi disparitas pendapatan yang cenderung meningkat harus diwaspadai. Inefisiensi ekonomi, melemahnya kestabilan dan solidaritas sosial dan perbedaan dianggap tidak adil sebagai akibat dari perbedaan pendapatan sehingga dapat menimbulkan konflik dan ketidakstabilan ekonomi (Todaro & Smith, 2011). Lembaga keuangan Swiss yaitu *Credit Suisse* menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki masalah disparitas pendapatan tinggi di Asia Tenggara setelah Thailand. Hal ini tentu harus segera diatasi karena Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak yang akan menimbulkan dampak negatif yang lebih kompleks (Murti, 2016).

Gambar 1.1
Indeks Gini Indonesia Tahun 2007-2021

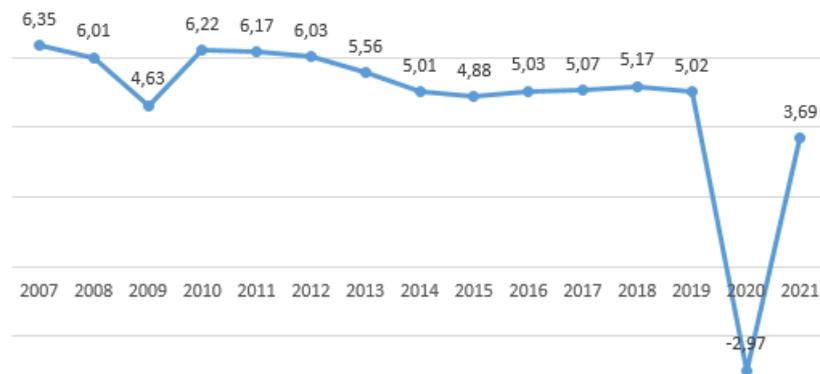


Sumber: *World Bank*

Berdasarkan Gambar 1.1 yang telah disajikan, pada tahun 2007 hingga tahun 2019 indeks gini Indonesia cenderung fluktuatif dengan nilai terendah berada di angka 0,360 di tahun 2009 yang berarti pada tahun tersebut terjadi pemerataan pendapatan yang lebih tinggi dari tahun yang lain pada periode 2007-2021. Lalu nilai tertinggi indeks gini Indonesia berada di angka 0,408 pada tahun 2013 yang berarti pemerataan pendapatan pada tahun tersebut rendah daripada tahun yang lain pada periode 2007-2021. Berdasarkan gambar 1.1 tersebut, nilai indeks gini Indonesia lebih dari 0,35 dan lebih kecil dari 0,50. Negara-negara dengan disparitas rendah memiliki indeks Gini antara 0,20 dan 0,35 dan disparitas tinggi memiliki angka $>0,50$. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa disparitas pendapatan di Indonesia masih belum berada pada level yang rendah dan perlu ditelaah lebih detail mengingat disparitas pendapatan yang terus menerus terjadi di masyarakat akan berdampak negatif bagi masyarakat itu sendiri (Heryanah, 2017).

Prof. Simon Kuznets (Fitriani et al., 2018), menyebutkan bahwa pertumbuhan sebagai kenaikan ekonomi yang berlangsung dalam waktu panjang di suatu negara dalam melakukan penyediaan berbagai barang ekonomi bagi penduduk; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang di perlukan.

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2007-2021



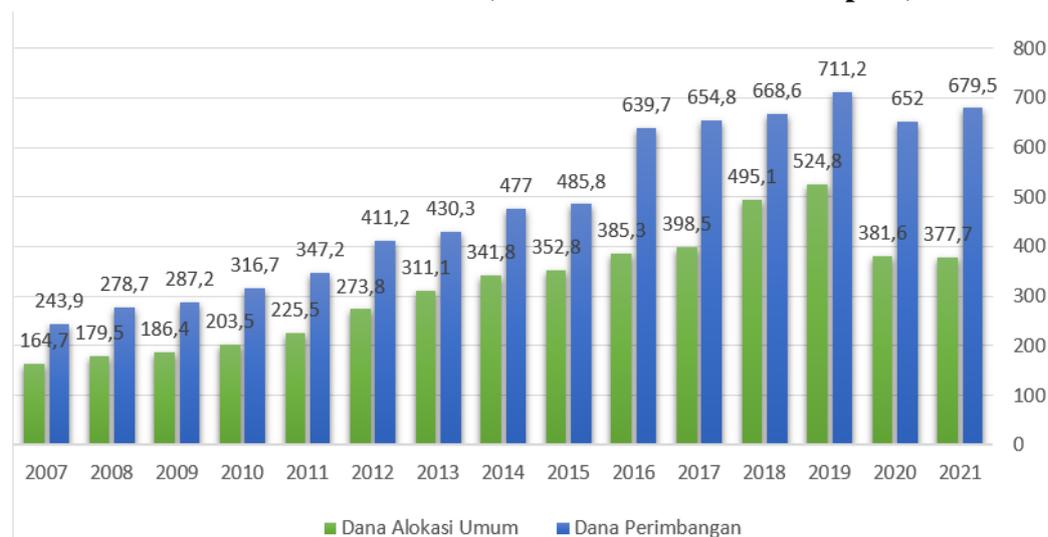
Sumber: *World Bank*

Pertumbuhan ekonomi Indonesia bervariasi setiap tahun antara tahun 2007 dan 2021. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai titik tertinggi pada tahun 2007 dengan tingkat pertumbuhan 6,35% dan titik terendah pada tahun 2020 dengan -2,97%. Pada tahun 2010-2014 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikemas dalam *Triple track strategy*, yang terdiri dari *pro-growth* (pertumbuhan ekonomi); *pro-poor* (mengentaskan kemiskinan); dan *pro-job* (penciptaan lapangan kerja/ penurunan pengangguran). Dengan adanya program ini pencapaian pembangunan ekonomi Indonesia diharapkan tidak hanya tampak dari segi kuantitas melainkan juga secara kualitas yang dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat di tahun 2020 menjadi -2,97% karena di tengah pandemi Covid-19 ini dunia usaha

benar-benar dalam kesulitan, banyak orang menganggur, pendapatan menurun dan daya beli masyarakat juga melemah.

Untuk mengatasi disparitas pendapatan tersebut maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan memberikan dana perimbangan kepada daerah berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah berupaya untuk membina aspek keuangan daerah dan menghilangkan ketimpangan baik horizontal maupun vertikal(Korry, 2018). Anggaran alokasi umum memegang porsi terbesar dari dana perimbangan. Gambar 1.3 mengilustrasikan hal ini, menunjukkan bahwa keseluruhan anggaran Dana Alokasi Umum melebihi 50% dari dana perimbangan yang disalurkan kepada daerah agar menurunkan disparitas pendapatan.

Gambar 1.3
Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Umum Indonesia
Tahun 2007-2021 (Dalam Satuan Triliun Rupiah)



Sumber: LKPP Kementerian Keuangan RI

Dana Alokasi Umum dalam teori keagenan memiliki hubungan antara

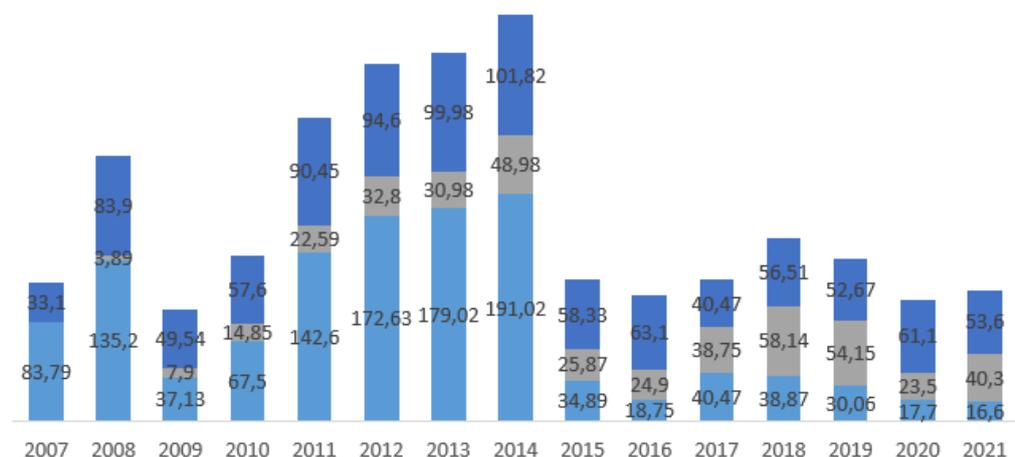
pemerintah pusat sebagai pihak *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Kegiatan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini dapat menambah alokasi belanja daerah untuk memenuhi segala pelayanan masyarakat serta pembangunan daerahnya yang dapat menurunkan tingkat disparitas pendapatan (Santoso, 2018). Dana alokasi umum disediakan dengan tujuan pemerataan kinerja ekonomi antar daerah, sehingga menurunkan ketegangan ekonomi antar daerah dan tingkat ketidakseimbangan keuangan antar daerah. Namun memiliki anggaran alokasi umum yang terlalu besar menimbulkan kesan bahwa daerah tidak mandiri secara finansial, yang pada akhirnya membuat pemerintah daerah bergantung pada dana negara (Nugraha, 2019).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi disparitas pendapatan adalah pengelolaan belanja APBN yang tidak efisien, terutama terkait belanja subsidi, khususnya belanja subsidi BBM. Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan produk krusial dalam segala kegiatan perekonomian. Dalam teori puncak minyak atau juga disebut sebagai Teori Puncak Hubbert (*Hubbert Peak Oil*) yang dikemukakan oleh Marion King Hubbert mengemukakan pandangan bahwa pada satu masa pengeluaran hasil bahan bakar minyak berkembang tinggi hingga ke satu puncak. Sesudah sampai ke puncak maka pengeluaran bahan bakar ini akan terus menurun sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal sehingga memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat karena subsidi BBM juga merupakan pengeluaran terbesar fiskal (Oktaveni, 2017). Namun, jika kebijakan subsidi BBM pemerintah mengarah pada semakin sedikit

keberpihakan golongan kelas bawah, hal itu mendorong tingginya disparitas pendapatan pendapatan(Diva, 2015).

Dapat dilihat pada gambar 1.4 tepatnya warna biru muda bahwa belanja subsidi BBM di Indonesia masih fluktuatif untuk pemberian anggarannya. Berdasarkan gambar 1.4 pada tahun 2009 subsidi BBM mengalami penurunan anggaran yang cukup curam disebabkan oleh penghapusan subsidi BBM jenis minyak goreng sehingga mempengaruhi pemberian subsidi BBM dalam laporan APBN. Tahun selanjutnya yaitu 2010-2014 subsidi BBM mengalami kenaikan anggaran dan terjadi penurunan anggaran yang cukup curam lagi pada tahun 2015. Sejak 1 Januari 2015, pemerintah resmi mengalihkan subsidi BBM premium melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) karena dinilai tidak tepat sasaran dan tingkat subsidi BBM premium terus menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga menghilangkan peluang belanja produksi lainnya. Kemudian pada 2020, terjadi penurunan jumlah anggaran subsidi akibat pandemi Covid-19.

Gambar 1.4
Anggaran Subsidi Energi Indonesia Tahun 2007-2021
(Dalam Satuan Triliun Rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan RI

Terdapat sejumlah pembenaran untuk melakukan penelitian ini, seperti yang ditunjukkan oleh uraian sebelumnya. Di Indonesia yang rasio gинinya di atas 0,35 sehingga mengakibatkan persoalan disparitas pendapatan belum tertangani. Kedua, faktor pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan subsidi BBM berdasarkan penelitian sebelumnya dinilai mempengaruhi disparitas pendapatan. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis mengangkat sebuah topik penelitian terkait disparitas pendapatan di Indonesia dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum Dan Subsidi BBM Terhadap Disparitas Pendapatan Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Indonesia periode tahun 2007-2021?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Indonesia periode tahun 2007-2021?
3. Apakah subsidi BBM berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Indonesia periode tahun 2007-2021?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan di Indonesia periode tahun 2007-2021.
2. Mengetahui pengaruh dari dana alokasi umum terhadap disparitas pendapatan di Indonesia periode tahun 2007-2021.
3. Mengetahui pengaruh dari subsidi BBM terhadap disparitas pendapatan di Indonesia periode tahun 2007-2021.

1.4 Manfaat

1. Bagi peneliti

Dapat melihat lebih dekat pengaruh subsidi BBM, alokasi umum dana, dan pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan di Indonesia antara tahun 2007-2021 dan dapat membandingkan pengaruh tersebut dengan teori yang ada yang menjelaskan kejadian serupa.

2. Bagi instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan pemerintah dalam menangani masalah disparitas pendapatan terkait dengan pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan subsidi BBM.

3. Bagi pihak lain

Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di antara pihak lain dan dapat dikonsultasikan atau digunakan sebagai sumber data dalam penyelidikan di masa mendatang tentang dampak pertumbuhan ekonomi, dan alokasi umum, dan subsidi BBM terhadap disparitas pendapatan Indonesia.